



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENERAPAN PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUR NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI NAGARI ADAT SITUJUH BATUR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

MUHAMMAD IHSAN
NIM. 11424103863

**PROGRAM STUDI S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU PEKANBARU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ PENERAPAN PERATURAN NAGARI SITUJUJH BATUR NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI NAGARI ADAT SITUJUJH BATUR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH “, yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Ihsan**
 NIM : 11424103863
 Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan daslam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2021 M
 9 Sya’ban 1442 H

Pembimbing Skripsi

RAHMAN ALWI, M.Ag
 NIP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Menutup Aurat Di Nagari Adat Situjuh Batur Dalam Prespektif Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad ihsan
NIM : 11424103863
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 April 2021
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Drs. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M. Si

.....

Penguji I

Dra. Asmiwati, M.Ag

.....

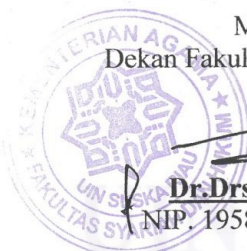
Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



.....

Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Muhammad Ihsan, (2021): Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Menutup Aurat di Nagari Adat Situjuh Batur dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya persoalan pada pelaksanaan penerapan peraturan nagari mengenai kewajiban berpakaian menutup aurat di nagari adat Situjuh Batur yang masih belum terlaksana dengan seksama. Yang mana semenjak di sah kan Peraturan Nagari no 1 tahun 2009 pasal 5 tentang kewajiban menutup aurat masih ada yang melanggar dan masih sangat jarang ketegasan dan diproses terhadap pelanggaran peraturan nagari tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana munculnya peraturan nagari Situjuh Batur tentang kewajiban menutup aurat di nagari Situjuh Batur. 2) Bagaimana penerapan peraturan nagari Situjuh Batur tentang pakaian menutup aurat. 3) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peraturan nagari Situjuh Batur tentang pakaian menutup aurat di Nagari Situjuh Batur. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, metode pengumpulan data yang gunakan melalui observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung guna mendapatkan data dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 6 orang yaitu 2 orang aparatur nagari, 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang cendekiawan dan 1 orang masyarakat, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan kemudian dianalisa dapat disimpulkan bahwa munculnya peraturan nagari Situjuh Batur tentang kewajiban berpakaian menutup aurat dipicu dari makin maraknya pemahaman masyarakat di Minangkabau terkhusus Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak mengerti pentingnya berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, penerapan peraturan nagari Situjuh Batur tentang pakaian menutup aurat masih terdapat masalah karena terjadi kendala pada pelaksanaan di lapangan atau kehidupan sehari-hari, yaitu masih ada elemen masyarakat yang melupakan adanya peraturan mengenai kewajiban berpakaian menutup aurat. Penulis juga melihat masih kurangnya ketegasan dari aparatur nagari mengenai pentingnya peraturan nagari No 1 tahun 2009 yang merupakan pokok dasar dari kasus-kasus sosial yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat salah satu nya merupakan dari berpakaian.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, pakaian menutup aurat, Situjuh Batur .*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita yang penuh kebodohan kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul: **”Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Menutup Aurat di Nagari Adat Situjuh Batur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah“** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada Orang tua dan keluarga tercinta saya, Ayahanda Alm. Drs. SYAIFUL M dan Ibunda ELIZAR S. Pd yang selalu memberikan dukungan moril dan spiritual kepada saya, serta abang dan kakak tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/Ibu Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, II, dan III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Sekretaris Jurusan. Para Staff TU yang telah membantu dan memberi kemudahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak H. Rahman Alwi, M. Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dengan penuh kesabaran dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhahammad Ihsan, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Universitas dan Fakultas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat setia Naen S.H, Muhammad Hafizal S.H, Rahamat hidayat S.H dan Reiy damara hermansyah S.H yang terus suport hingga selesainya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2014. Dan keluarga besar Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini .

Pekanbaru, 17 Maret 2021

Penulis

MUHAMMAD IHSAN

NIM. 11424103863



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH	
A. Sejarah Singkat	15
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	18
C. Pembentukan Peraturan Daerah.....	22
D. Proses Pembentukan Peraturan Daerah	34
E. Penegakan Peraturan Daerah	37
F. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda	41
BAB III : TINJAUAN UMUM PAKAIAN MENUTUP AURAT DALAM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Akhlak Berpakaian Menutup Aurat.....	46
B. Tata Cara Muslim dan Muslimah Menutup Aurat.....	54
C. Batasan-batasan Aurat	56
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latar Belakang Munculnya Pernag No 1 Tahun 2009 tentang Pakaian di Nagari Adat Situjuh Batur.....	63

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penerapan PERNAG Pakaian Menutup Aurat di Nagari Adat Situjuh Batur	66
C. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Berpakaian Menutup Aurat di Nagari Situjuh Batur (PERNAG No 1 Tahun 2009)	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah mengatur segala kewenangan daerah dari mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil di bawahnya. Hal ini terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 23 Tahun 2014 yang menyampaikan penerapan otonomi daerah sebagai payung hukum.

Hal ini merupakan Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten, urusan pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah sendiri atau dapat melimpahkan sebagai urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada daerah atau pemerintah desa.¹

Pada perkembangan masa Reformasi Nasional berlansung pada tahun 1997 sampai 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang otonomi yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perihal Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah untuk mengintervensi Pemerintah terendah termasuk Nagari.

Nagari merupakan penyebutan nama lain dari desa di Minangkabau, hal ini telah ada dalam sejarah dan perkembangannya yang merupakan suatu Pemerintahan terendah. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 363

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi²: “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”

Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang di dalamnya terdapat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintah Nagari. Tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.³

Nagari adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁴

Falsafah adat ini sudah menjadikan keyakinan umum orang-orang di Minangkabau adalah hasil dari peraturan antara adat dan agama Islam.⁵ Dalam kaitan ini, salah satu bentuk regulasi tersebut ialah peraturan daerah yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Peraturan daerah Sumatera Barat terkhususnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bernuansa syariah selalu dikaitkan

² Ibid

³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1997), h. 24.

⁴ *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*

⁵ Mas’Oed Abidin, *Ensiklopedia Minangkabau*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau), Edisi-1, h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan faktor sosial budaya masyarakat Minangkabau. Salah satu ajaran islam sangat kuat dengan kultur masyarakat Minangkabau yaitu tentang Undang-undang kewajiban berpakaian muslim dan muslimah dalam hal ini ditetapkan pada lembaran Perundang-undangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2003 nomor 58.

Implementasi perda syariah di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota turut memicu kesadaran masyarakat Islam di Minangkabau akan pengalaman agamanya. Pada aspek lain, legalitas Islam di tengah ruang publik melalui perda-perda syariah mengindikasikan Islam dapat lebih ekspresif.⁶

Berdasarkan kehidupan masyarakat Minangkabau saat ini terkhususnya generasi muda Kabupaten Lima Puluh Kota semakin jauh dari nilai-nilai keislaman, turunnya moralitas dan akhlak pemuda dan pemudi Kabupaten Lima Puluh Kota yang semakin jauh dari nilai-nilai filosofi adat.

Hal ini menjadi acuan oleh Pemerintah Daerah Nagari Situjuh Batur yang memberlakukan peraturan mengenai berpakaian muslim dan muslimah yang menutup aurat, hal ini ditetapkan dalam Peraturan Nagari “Bagi setiap elemen masyarakat adat Situjuh Batur diwajibkan keluar menggunakan pakaian muslim atau muslimah dan menutup aurat (PERNAG Situjuh tahun 2009). Kebijakan bernuansa syariah ini untuk membentengi masyarakat desa Situjuh Batur Kabupaten Lima Puluh Kota terutama generasi muda agar terhindar dari budaya luar yang bisa menjadikan mereka semakin jauh dari nilai-nilai ajaran adat dan agama, agar bisa mengembalikan falsafah adat kebudayaan Minangkabau “*Adat*

⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1996), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

basandi syarak, Syarak basandi kitabullah” kepada generasi muda Minangkabau terutama generasi muda Situjuh Batur.⁷

Menurut pandangan Fiqh siyasah perintah memakai pakaian menutup aurat bagi kaum muslim dan muslimah ini bertujuan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya bagi kaum pria lebih sopan dan bermartabat untuk kaum wanita melindungi dari perbuatan perbuatan maksiat, apabila sebuah keputusan pemimpin itu banyak mengandung kemashlahatan dibandingkan dengan mudharatnya maka perintah tersebut wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Dan berdasarkan kaidah fiqh siyasah:⁸

...تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Sehubungan dengan hal diatas menarik perhatian penulis untuk menyusun skripsi dengan judul : “Penerapan Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Situjuah Tahun 2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat Prespektif Fiqh Siyasah”

Penulis mentelaah tentang penerapan peraturan adat nagari Situjuh Batur berdampak pada peningkatan religiusitas masyarakat Situjuh Batur dalam penggunaan pakain muslim dan muslimah yang mempunyai nilai-nilai keagamaan bagi semua kalangan masyarakat Situjuh Batur. Dalam hal ini mengupayakan peningkatan nilai keagamaan didalam dinamika peraturan nagari.

⁷ Ibid

⁸ A Diazulli Kaidah Kaidah Fikiah (Jakarta: Putra Grafika, 2006), h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat empat pokok yang menjadikan dasar landasan substansi dalam peraturan Nagari Situjuh Batur, yaitu:

1. Menjaga moralitas masyarakat secara umum.
2. Mengatur tentang model dan tata cara berpakaian sesuai syariat.
3. Menyangkut keterampilan dalam upaya beragama⁹

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini adalah Seputar Penerapan Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat Prespektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang penulis tuliskan diatas, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa rumusan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana latar belakang munculnya Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Sitijuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat

⁹ Wawancara Wali Nagari Situjuh Batur Dt. Tan Marajo, 17 Juli 2019

Situjuh Batur Keluar Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Situjuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Situjuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Situjuh/2009 Kewajiban Setiap Masyarakat Situjuh Batur Keluar Menggunakan Pakaian Muslim Dan Muslimah / Menutup Aurat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang latar belakang Peraturan Adat Nagari Situjuh Batur No 1/Pernag Situjuh/2009 Dan Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Nagari.
- b. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah khasanah bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Sebagai judul skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Metode Penelitian

Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data dilapangan dan dibantu dari sumber-sumber kepustakaan.¹⁰

Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Yakni dengan melalui penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

2. Lokasi

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kenagarian Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Subjek dan Objek

a. Subjek

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi

¹⁰ Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kondisi latar penelitian.¹¹ Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat, Cendikiawan, Masyarakat Situjuh Batur.

b. Objek

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.¹² Oleh karena itu objek sasaran untuk melakukan penelitian ini adalah tentang peraturan adat nagari Situjuh Batur no 1/pernag Situjuh/2009 “Kewajiban setiap masyarakat Situjuh Batur keluar menggunakan pakaian muslim dan muslimah / menutup aurat”.

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan di nagari situjuh batur terdiri dari aparatur nagari 14 orang, tokoh adat 20 orang, tokoh masyarakat 4 orang, cendikiawan 5 orang dan masyarakat situjuh batur yang ditemui.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 132

¹² Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2003), h. 303

¹³ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.¹⁴ Demi pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya, maka penelitian ini mengambil sampel yang berjumlah 6 orang terdiri dari aparaturnagari 2 orang, tokoh adat 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, cendikiawan 1 orang dan masyarakat situjuh batur yang ditemui 1 orang. Maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yaitu dimana teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu dari populasi.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁵

Sumber data ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

Untuk mendukung hasil ini, maka data yang diperlukan adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penelitian.¹⁷ Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

¹⁴ Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.23

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 114

¹⁶ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 42

¹⁷ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi.¹⁸

Data yang diperoleh yaitu data yang tersedia dipergustakaan, data sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan daerah dan peraturan nagari, serta referensi lain yang membahas tentang penelitian sejenis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data yang primer maupun yang sekunder. Adapun metode-metode tersebut adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁹

Yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data tentang penerapan peraturan nagari adat situjuh batur terkait pakaian menutup aurat.

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: UPFE UMY, 2003), h.42

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaan yang tepat atau proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁰

Adapun target wawancara adalah melalui proses tanya jawab langsung dengan wali nagari, sekretaris nagari, pemuka adat, tokoh masyarakat, cendikiawan, masyarakat situjuh batur.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²¹

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani yaitu benda-benda tertulis, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan data yang diperlukan.²²

7. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini

²⁰ Ibid

²¹ Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 14.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

8. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul maka diperlukan untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul tersebut. Selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

Yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.²³

b. Metode Deskriptif

Yaitu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat dipahami pembahasan dalam penelitian, maka penulis merancang menjadi lima bab dan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab pertama yaitu pembahasan yang membahas tentang latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan yang mendasari penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet 2, h.108

²⁴ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegunaan dari penelitian, kemudian metode penelitian, sistematika penulisan untuk memapar alur pembahasan.

BAB II :LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang daerah yang diteliti, Pengertian Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, Penegakan Peraturan Daerah, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

BAB III :PAKAIAN MENUTUP AURAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang Tinjauan umum akhlak Berpakaian menutup aurat, Tata cara Berpakaian Muslim dan Muslimah menutup aurat, Batasan-batasan aurat dan Fungsi berpakaian menutup aurat.

BAB IV :LATAR BELAKANG MUNCULNYA DAN PENERAPAN PERNAG NO 1 TAHUN 2009 SERTA TINJAUAN FIQH SIYASAH

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang munculnya Pernag no 1 tahun 2009 dan penerapan pakaian

menutup aurat di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari , Kabupaten Lima Puluh Kota, dan tinjauan fiqh siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima adalah penutup. Bab ini akan memuat kesimpulan dari latar belakang munculnya peraturan daerah dan tinjauan fiqh siyasah mengenai peraturan daerah dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH

A. Sejarah Singkat Desa Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Situjuh Batur adalah sebuah nagari yang terletak dilemang Gunung Sago, yang terletak dalam wilayah Kecamatan Situah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jarak tempuh dari Kota Payakumbuh sepanjang lebih kurang 12 km dengan ketinggian 660 meter diatas permukaan laut.²⁵ Situjuh Limo Nagari adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten lima puluh kota, Sumatera barat. Yang terdiri dari 5 nagari yaitu:

1. Situjuh Banda dalam, terdiri dari 8 jorong: Banda Dalam, Gurun, Tangah Padang, Padang Ambacang, Koto Baru Lurah Pantai, Sungai Jilatang, Subarang Tabek, Koto Laweh.
2. Situjuh Gadang, terdiri dari 6 jorong : Padang Kuniang, Situjuh Gadang, Padang Jariang, Kociak, Tanjuang Bungo, Tanjuang Simantuang.
3. Situjuh Batur, terdiri dari 6 jorong: Tangah, Tapi, Bumbuang, Lakuang, Koto, Kubang Bunkuak
4. Situjuh Tungkar, terdiri dari 6 jorong: Dalam Nagari, Sawah Laweh. Sawah Langsek, Taratak, Sialang.
5. Situjuh Ladang Laweh terdiri dari 2 jorong: Jorong Ateh, Jorong Bawah.²⁶

²⁵ Makinuddin Syahril, *Buku sejarah peristiwa Situjuh ditengah perjuangan bangsa, (Situjuh Batua, 2019)*, h. 2

²⁶ *Ibid*

Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Limo Nagari secara menyeluruh menurut per-jorong:

- Tabel Penduduk Situjuh Batur menurut jenis kelamin per jorong

No	Jorong	JK			keterangan
		Lk	Pr	Jumlah	
1	Bumbung	334	339	683	
2	Koto	510	511	1.021	
3	Kubang Bungkuak	418	406	824	
4	Lakung	369	386	755	
5	Tengah	788	832	1.620	
6	Tepi	283	299	582	
	Jumlah	2.712	2.773	5.485²⁷	

Sumber : Kantor Wali Nagari Situjuh Batur

NB: Jorong Tengah merupakan mayoritas penduduk yang padat yang merupakan pusat segala pemerintahan Situjuh Batur (Kantor Wali Nagari, Kantor Bamus, Karang Taruna dll) yang mana segala pengurusan dan juga merupakan titik temu dari setiap persoalan di daerah Situjuh Batur.

• Keadaan Geografis

Kecamatan Situjuh Limo Nagari memiliki luas daerah 74,18 Km. diapit oleh 4 Kecamatan dan 1 Kabupaten yaitu: Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Luak dan Kabupaten Tanah Datar, dengan ketinggian dari permukaan laut 500-700 meter²⁸. Kecamatan Situjuh Limo Nagari terdiri dari 4 batas daerah, sebelah Utara yaitu Kecamatan Payakumbuh

²⁷ Dokumentasi Kantor Wali Nagari Situjuh Batur 2020

²⁸ Makinuddin Syahril, *Buku sejarah peristiwa situjuh ditengah perjuangan bangsa, (Situjuh Batua, 2019)* h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selatan, sebelah Selatan Kabupaten TanahDatar, sebelah Barat yaitu Kecamatan Luak dan sebelah Timur yaitu Luak.Luas daerah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari menurut Nagari terdiri dari 5 nagari yaitu: Situjuag gadang, Situjuah Banda dalam, Situjuah batua, Situjuah Tungka dan Situjuah ladang laweh. Nagari yang terluas yaitu Situjuah gadang sebesar 16.9Km dan yang terkecil nagari Situjuah bandadalam sebesar 11,71 Km.

Jarak dari nagari ke Ibu Kota kecamatan terjauh yaitu nagari Situjuah ladang laweh sejauh 4 Km sedangkan jarak dari nagari Ke Ibu Kota Kabupaten terjauh yaitu nagari Situjuah Ladang Laweh sejauh 24 Km.Kabupaten Lima puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, dengan perbandingan luas Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan Kecamatanlainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu kecamatan Kapur IX merupakanKecamatan yang terluas sebesar 723,36 dibandingkan dengan Kecamatanlainnya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Kecamatan yang terkecil jika dibandingkan dengan Situjuah Limo Nagari yaitu Kecamatan Luak sebesar 61,68.²⁹

Jika ditinjau dari alam Situjuh Batur yang penuh dan dikelilingi bukit-bukit dan lembah serta deretan sawah-sawah yang berjenjang kearah gunung sago mata pencaharian masyarakat pada umum nya adalah bertani, terutama bebudidaya padi.

Visi Desa Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah: “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat dan relegius dengan mengembangkan potensi sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin.”³⁰

²⁹ Ibid

³⁰ Makinuddin Syahril, *Buku sejarah peristiwa Situjuh ditengah perjuangan bangsa, (Situjuh Batua,2019)* h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Misi Desa Situjuh Batur Kecamatan Situjuah Limo Nagari Adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
3. Meningkatkan sarana air bersih bagi masyarakat.
4. Perbaikan dan meningkatkan layanan kesehatan dan umum
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM
7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen masyarakat.
8. Meningkatkan kapasitas Aparat Desa dan BPD.
9. Peningkatan sarana dan prasarana kerja Aparat Desa dan BPD

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah.³¹ Sedangkan Perda menurut ketetapan MPR tahun 2000 adalah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan

³¹Soebono Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 14.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- d. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap
- e. Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³²

f.

³² Soebono Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Meski demikian, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4). Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.

Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan. Untuk itu M. Sooly lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara memulai pencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhir pengundangan peraturan yang bersangkutan.

Berikut ini beberapa pengertian peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Pengertian Peraturan Daerah dalam Permendagri No 1 Tahun 2014

Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Pengertian peraturan daerah tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 angka (4) Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.³³

2. Pengertian Peraturan Daerah dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011

Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota

³³ Abdul Latief, *Hukum Dan Peraturan Kebijakanaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*,, h.

disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

C. Pembentukan Peraturan Daerah

1. Landasan Pembuatan Perda

Perda merupakan Implementasi sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Perda dan masyarakat. Pembuatan Perda memiliki perbedaan sifat substansi materi, sebab muatan Perda dibuat kadang dalam rangka penyelenggaraan otonomi, pembantuan maupun substansi Perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu Perda adalah suatu perundang-undangan yang menjadi sarana komunikasi dan demokrasi antara Perda itu sendiri dengan masyarakat, maka sekurang-kurangnya dalam penyusunan Perda harus memiliki 3 (tiga) landasan dalam pembuatannya,³⁴

- I. Landasana *yuridis*, yaitu landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Perda, apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan Perda karena akan menunjukkan adanya wewenang pembuat perda, kesesuaian

³⁴Syamsul Bachrie, "Keberadaan Peraturan Daerah dan Permasalahannya", Jurnal Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar, Vol. 5, No. 2, 2004, h. 211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, mengikuti tata cara tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.³⁵

Kalau tidak, maka peraturan Perundang-undangan itu akan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁷ Adapun dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah :

- 1) UUD 45 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B
- 2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Keputusan Presiden No. 44 tahun 1999 tentang tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan, bentuk rancangan undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
- 4) Keputusan Mentri Dalam Negri No. 21, 22, 23 dan 24 tahun 2003
- 5) Tata Tertib DPRD Propinsi Kabupaten/Kota³⁶
- 6) UU NO. 23 tahun 2004
- 7) UU No. 10 tahun 2004³⁷

b. Landasan Sosiologis (*Sosiologische Gronsleg*). Suatu Perda dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini berarti bahwa Perda yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pada perinsipnya yang

³⁵Tata urut Perundang-undangan Republik Indonesia adalah: (1) UUD 4; (2) Ketetapan MPR RI; (3) Undang-undang. (4) Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu); (5) Peraturan Pemerintah; (6) Keputusan Presiden; (7) Peraturan Daerah.

³⁶ *Peraturan Daerah dan Permasalahannya*, website, [http:// www.iri-indonesia.org/](http://www.iri-indonesia.org/) 21 februari tahun 2006, diakses, tanggal 20 desember 2020.

³⁷ Abdul Latief, *Hukum Dan Peraturan Kebijakanaksanaan Pada Pemerintahan Daerah*,, h. 59

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, dan jika tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya. Tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak ditaati dan dipatuhi.

- c. Landasan Filosofis (*Filosofische Gronnslag*). Pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral dan etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah tertentu. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Keberadaan Peraturan Daerah dalam UUD 1945 sebelum diamandemen memang tidak dikenal, sehingga peraturan Daerah termarginalkan dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setelah UUD 1945 diamanden, eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapny berbunyi; “ Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “. Sebagai landasan utama kewenangan DPR dalam mengusulkan Rancangan Undang-undang tertuang dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1), menyatakan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya dipertegas lagi pada Pasal 12 tahun 2011 menyatakan, bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.³⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan: . Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Keharusan mengikuti tata cara tertentu; Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 39 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan daerah. Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Prolegda

³⁸ Syarif Hidayat, *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah*, Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan.

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa.

2. Kewenangan Pembentukan Perda

Kewenangan pada Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah dalam pembentukann Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasi negara.³⁹ Unsur kewenangan selalu dikaitkan dengan unsur/elemen “kewenangan” atau “Jabatan” atau “kedudukan”, oleh karena itu dalam penggunaanya harus dibedakan antara prinsip pertanggung jawaban jabatan, prinsip pertanggung jawaban pribadi. Dalam pengertian bahwa tanggung jawab jabatan harus dibedakan dengan tanggung jawab pribadi.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislative dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang) c) keadilan; d) kejujuran; e).kebijakbestarian;dan f) kebajikan.⁴⁰

³⁹ W.Riawan Tjandra dan Kresna Budi Darsono, *Legislative Drafting; Teori dan Tenknik Pembuatan Peraturan Daerah*, penerbit UAJY, Yogyakarta,2009 h. 25

⁴⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 37-38

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara⁴¹. Kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan juga merupakan kekuasaan yang melekat secara atributif kepada legislatif sebagai perwakilan seluruh rakyat yang berada di dalam lapangan hukum publik. Salah satu kewenangan organ negara adalah kewenangan DPRD untuk membuat undang-undang atau Peraturan Daerah.

Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh UUD 1945 untuk DPR dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan berdasar atas prinsip atau asas akuntabel dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan peraturan yang mendasarinya.

Kaitannya dengan pembentukan Perda, wewenang yang dimiliki DPRD merupakan wewenang atributif, karena wewenang tersebut diberikan oleh undang-undang, khususnya Undang Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan wewenang yang dimiliki oleh eksekutif, karena Perda hanya dapat dibentuk secara bersama-sama

⁴¹ Miriam Budiardjo, Op Cit,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara DPR dengan Pemerintah. Oleh karena itu, hubungan antara kedua lembaga ini disebut sebagai hubungan *partnership*, tidak ada sebuah produk Perda yang dibentuk oleh DPRD tanpa kerjasama dengan Pemerintah, sebaliknya tidak ada Perda tanpa DPRD.⁴²

Apabila mengacu pada teori wewenang sebagaimana terurai di atas, maka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pembentukan Perda tidak terletak pada kekuasaan DPRD, melainkan berada pada kekuasaan dua lembaga atau dua organ sekaligus, yaitu pada kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah. Sebab tidak ada kewenangan pembentukan Perda yang hanya dilakukan oleh DPRD tanpa Pemerintah. Secara teoritis sebutan legislatif terhadap DPRD, sebab sesuai dengan kewenangan pembentukan undang-undang atau Perda, selalu pembentukannya berada pada dua lembaga/ organ tersebut.

Mengutip pendapat H. D. Stout, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh sub jek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴³

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban

⁴² *ibid*

⁴³ Sebagaimana yang dikutip dari H.D. Stout dalam Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 101

(*rechten enplichten*). Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁴⁴

Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih memilih bentuk kedua, yaitu daerah menyelenggarakan semua urusan rumah tangga pemerintahan daerahnya di luar urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Hal ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) undang-undang tersebut, yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu: a. agama; b. moneter dan fiskal nasional; c. keamanan; d. pertahanan; e. politik luar negeri; dan f) yustisi.

Di luar ke enam urusan tersebut menjadi urusan masing-masing daerah, namun dalam prakteknya terhadap di luar ke enam urusan pemerintahan tersebut.

3. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain:

⁴⁴ *ibid*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;⁴⁵
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur. Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;

Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi,⁴⁶ tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- b. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- d. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda

⁴⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, h. 70

⁴⁶ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perda dapat memuat ketentuan bebanbiaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- g. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- h. Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran daerah.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,⁴⁷ mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/ Bupati/Walikota
- b. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah.
- f. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- g. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah. Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota,

karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda).

Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk RanPerda atau Perda.⁴⁸

⁴⁸ Syamsul Bachrie, "Keberadaan Peraturan Daerah dan Permasalahannya", Jurnal Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar., h. 218-219

4. Muatan dan Mekanisme Penyusunan Perda

Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan ditingkat daerah untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang urusan rumah tangga daerah berdasarkan asas desentralisasi dan asas pembantuan.⁴⁹ Jadi pada prinsipnya Perda dibentuk untuk;

1. *Pertama*, dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
2. *Kedua*, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain dan peraturan perundang-undangan yang lain.⁵⁰

Sedangkan mekanisme penyusunan Perda dapat dilihat dalam penjelasan umum UU No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan DPRD mengandung pengertian bahwa pembentukan peraturan daerah dilakukan bersama-sama. Inisiatif pembentukan Perda dapat dilakukan Kepada Daerah atau DPRD.⁵¹

Rancangan Perda baik hasil prakarsa Kepala Daerah maupun prakarsa DPRD, harus melalui beberapa tahapan pembahasan dalam lingkup DPRD,⁵² sampai pengambilan keputusan persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda tersebut. Pembahasan di DPRD biasanya diformat dengan tahapan pengantar eksekutif pada sidang paripurna Dewan, pandangan umum fraksi, pembahasan dalam PANSUS, catatan akhir fraksi, persetujuan anggota DPRD terhadap draf

⁴⁹ Abdul Latief, *Hukum Dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintahan Daerah*,, h. 148.

⁵⁰ Syamsul Bachrie, "Keberadaan Peraturan Daerah dan Permasalahannya", Jurnal Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar,, h. 220-222

⁵¹ UU No. 32 tahun 2004, Pasal 140 ayat (1) menyebutkan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, gubernur, atau Bupati/Walikota.

⁵² UU No. 10 tahun 2004, Pasal 10 ayat (11-14)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

raperda yang kemudian disampaikan kembali oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Perda. Penandatanganan Perda yang sudah disetujui dilakukan oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta pimpinan DPRD.

Dalam konsep hukum, Perda tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum materil terhadap pihak yang menyetujuinya sejak ditandatangani.⁵³ Oleh sebab itu rumusan hukum yang ada dalam raperda tersebut sudah tidak dapat diganti secara sepihak.

D. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”).

Peraturan Daerah (“Perda”) menurut UU 12/2011, terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Provinsi; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁵⁴ Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, mekanisme pembentukan Perda terbagi menjadi

⁵³ UU No. 5 tahun 1974, Pasal 44 ayat (22)

⁵⁴ W.Riawan Tjandra dan Kresna Budi Darsono, *Legislative Drafting; Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, penerbit UAJY, Yogyakarta, 2009, h. 85

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 (empat) bagian, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan:

a. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Provinsi. Baik perda provinsi maupun perda kota/kabupaten memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

- 1) latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- 4) jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- 1) perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- 2) rencana pembangunan daerah;
- 3) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD⁵⁵ Provinsi atau Gubernur. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

c. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

d. Penetapan dan Pengundangan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama,

⁵⁵ *ibid*

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.⁵⁶

Peraturan Daerah Provinsi diundangkan dalam Lembaran Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

E. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan peraturan Pemerintahanan Daerah dikenal dengan tiga prosedur atau asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.⁵⁷ Penjelasan mengenai ketiga asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “*de*” yang artinya dan “*centrum*” yang artinya pusat. Sehingga desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pusat. Asas desentralisasi adalah asas yang dimaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tanggasesendiri, yang biasanya disebut dengan otonomi.⁵⁸

Pembagian bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Berupa kewenangan untuk merencanakan,

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ Sirojul Munir, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 102.

⁵⁸ Lukman Santoso As, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 43.

memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, antara lain:

- a. Dekonsentrasi;
- b. Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah;
- c. Pelimpahan kewenangan (delegasi) ke pemerintah daerah;
- d. Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga Negara ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).⁵⁹

2. Asas Dekonsentrasi

Pelaksanaan desentralisasi terdapat beberapa tingkat peralihankewenangan, yakni kewenangan merencanakan, mencetuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain, aspek dari hubungan kewenangan ini adalah dekonsentrasi.⁶⁰ Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang mengandung arti bahwa kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, atau

⁵⁹ Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Yogyakarta, h. 62

⁶⁰ Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Perpustakaan Nasional, Yogyakarta, h. 54-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya.⁶¹ Kewenangan ini merupakan terakhir berada pada Pemerintahan tingkat atas yang menugaskan.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintahan pusat.⁶²

Bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 telah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah⁶³ Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945⁶⁴.

⁶¹ Munir, Sirojul, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia, Konsep Azas dan Aktualisasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 108.

⁶² H.A.W. Widjaja, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 169.

⁶³ Muhammad Alim, *Perda-Perda Bernuansa Islam Dan Hubungannya Dengan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jurnal Hukum Vol.17 : 2010)h. 2

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁵. Dengan adanya otonomi daerah itulah kemudian daerah berlomba-lomba untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya kedalam peraturan daerah. Dalam kaitan ini, salah satu bentuk regulasi tersebut ialah peraturan daerah yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Ketika sistem desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan, berbagai peraturan daerah yang mengatur soal kehidupan beragama masyarakat pun mulai bermunculan. dalam kaitan ini, pemerintahan kabupaten lima puluh kota juga menjadi salah satu daerah yang telah menetapkan kebijakan berdasarkan syariah. salah satu peraturan daerah yaitu Undang-Undang mengenai kewajiban berpakaian muslim dan muslimah hal ini ditetapkan dalam lembaran perundang-undangan daerah kabupaten lima puluh kota tahun 2003 nomor 58.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau saat ini terkhususnya generasi muda Kabupaten Lima Puluh Kota atau pun Payakumbuh semakin jauh dari nilai-nilai keislaman, turunnya moralitas dan akhlak pemuda dan pemudi Kabupaten Lima Puluh Kota yang semakin jauh dari nilai-nilai filosofi adat. Situjuh Batur yang merupakan salah satu negeri adat yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah dan dibawah naungan langsung MUI Sumatera Barat. melihat masih banyaknya tata cara berpakaian masyarakat Situjuh Batur baik dikalangan muda-

⁶⁵ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudi dan dewasa masih kurangnya pemahaman tentang adat-adat berpakaian dalam Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Hal ini menjadi acuan oleh Pemerintah Daerah Nagari Situjuh Batur yang memberlakukan peraturan mengenai berpakaian yang menutup aurat, hal ini ditetapkan dalam peraturan nagari “Laki-laki dan Perempuan masyarakat Situjuh Batur diwajibkan keluar menggunakan pakaian muslim atau muslimah yang menutup aurat (PERNAG Situjuh Pasal 5 No 1 tahun 2009)”. Dan sanksi bagi pelanggar dalam lampiran peraturan nagari ini tertuang pada bab VI (KABEK AREK/SANKSI) yaitu: “Bagi setiap pelanggar peraturan ini mengacu kepada Undang-Undang dan Duo Puluah dan adat salingka nagari” yang dimaksud disini adalah pemberian sanksi diserahkan kembali kepada Datuk dan Ninik Mamak pemuka nagari Situjuh Batur.

Kebijakan bernuansa syariah ini untuk membentengi masyarakat desa Situjuh Batur kabupaten Lima Puluah Kota terutama generasi muda agar terhindar dari budaya luar yang bisa menjadikan mereka semakin jauh dari nilai-nilai ajaran adat dan agama, agar bisa mengembalikan falsafah adat kebudayaan Minangkabau “Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah” kepada generasi muda-mudi Minangkabau terutama generasi muda-mudi Situjuh Batur melalui peraturan daerah ini.

F. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, dimana dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sherry Arnstain dalam A ladder of citizen participation membuat skema 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan :

1. Tingkatan pertama yaitu control warga Negara

Pada tahap ini partisipasi sudah mencapai tataran dimana public berwenang memutuskan, tahap ini merupakan tahap tertinggi dalam tingkat partisipasi rakyat.⁶⁶

2. Tingkatan kedua yaitu delegasi kewenangan

Dimana kewenangan masyarakat lebih besar daripada penyelenggaraan Negara dalam memutuskan kebijakan

3. Tingkat ketiga yaitu kemitraan

Adanya keseimbangan kekuatan relatif Antara pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan pengambilan keputusan bersama-sama

4. Tingkat keempat hingga tingkat keenam yaitu peredaman konsultasi dan informasi;⁶⁷

5. Tingkat ketujuh dan delapan yaitu terapi dan manipulasi;

Dalam tingkat ini menunjukkan ketiadaan partisipasi, karena pada tahap ini terapi masyarakat hanya dianjurkan untuk mengadu kepada pihak yang berwenang. Pasal 96 UU 12/2011 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁸

⁶⁶ Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *hukum pelayanan public (berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi)*, Setara press, 2011 h. 171

⁶⁷ Ibid.h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Masukan secara lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sebagaimana dikutip dari Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,⁶⁹ oleh Tim Pengkajian Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (hal. 76) yang mengutip pendapat Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera dalam Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa yang berjudul Hubungan Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 32

⁶⁸ Sovia Hasanah, *Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, 2017, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1146021a8b0/peran-masyarakat-dalam-pembentukan-perda> akses 5 Desember 2020 16:15

⁶⁹ *ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, bahwa di antara model partisipasi yang dapat dilakukan dalam pembentukan peraturan antara lain:

- a. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam team atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan *public hearing* melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihakpihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan, musyawarah rencana pembangunan;
- c. Melakukan uji sah terhadap peraturan daerah;
- d. Melakukan jejak pendapat, kontak public melalui media massa;
- e. Melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) atau membentuk forum warga.

Pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik ditingkat local akan menjadi reperentasi sejauh mana tingkat dan kualifikasi demokrasi pada pemerintah yang bersangkutan. Se jauh mana pemerintah membuka ruang partisipasi publik, sejauhmana gagasan diolah bersama dan implementasi kebijakan diawasi oleh masyarakat merupakan serangkaian dari proses itu sendiri.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-

⁷⁰ Annisa Turi Hardianingsih, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon Progo* dikutip dari Sigit wahyudi, *Demokrasi di Tingkat Lokal* dalam Kegiatan Diskusi Sejarah wajah demokrasi di Indonesia, Yogyakarta, 30-31 maret 2009, [http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Demokrasi_Lokal-sarjana .pdf](http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Demokrasi_Lokal-sarjana.pdf), akses 2 Desember 2020 jam 12.05, h. 7

undangan melalui rapat dengar pendapat umum,⁷¹ kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Memang benar bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui kegiatan sosialisasi pembentukan perda.

Sayangnya, dalam Pasal 96 UU 12/2011 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana masyarakat dapat menyampaikan masukan. Namun dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengambil keuntungan diantaranya, yakni :

1. Pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan masyarakat dan cara memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan baik
2. Dapat mengembangkan rasa saling percaya Antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga terbina hubungan yang harmonis Antara keduanya. implementasi berbagai proyek bersama Antara pemerintah daerah dan masyarakat, agar terwujudnya *good government*.⁷²

⁷¹ *ibid*

⁷² Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *op.cit.* h. 117

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PAKAIAN MENUTUP AURAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Tinjauan Umum Akhlak Berpakaian menutup aurat dalam Islam

1. Akhlak Berpakaian Islam

Secara etimologi, akhlak berasal dari Bahasa Arab *jama*” dari bentuk mufardnya “*khuluqun*” yang menurut logat diartikan: budi pekerti, tingkah laku atau tabi’at. Dalam bahasa Inggris pengertian khuluq ini disamakan dengan kata *ethics* dan *morality*.

“ *Ethics (moral philosophy), the philosophical study of morality. And morality is beliefs concerning right and wrong, good and bad, they can include judgments, rules, principles, and theories*”⁷³

Secara terminologi, sebagaimana dikutip oleh Nur Hidayat dalam buku “Akhlak Tasawuf” pertama, Ibnu Maskawih memberi definisi akhlak yaitu keadaan gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran. Kedua, Al-ghazali memandang bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah atau tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang akan muncul secara spontan apabila dibutuhkan tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan karna sudah terjadi terus menerus dan menjadi kebiasaan.⁷⁴

Sedangkan berpakaian mempunyai kata dasar “pakai” yang mendapat awalan ber- dan berakhiran –an yang berarti mengenakan pakaian. Pakaian adalah

⁷³ Lewis Vaughn, *Doing ethics (Moral reasoning and Contemporary issues*, (United states of Amerika: matrix Publishing Services, 2008), h. 7

⁷⁴ Nur Hidayat, *Akhlak Tasawuf*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

barang yang dipakai seperti baju dan celana. kosa kata yang seringkali merujuk dan terkait dengan pakaian adalah baju, jilbab, penutup tubuh, al-libas (tutup dan menutupi). Menurut para ulama penjelasan mengenai terkait akhlak berpakaian dalam islam yaitu:

- a. Abdullah Nasih Ulwan, menyatakan bahwa akhlak berpakaian seorang Islam adalah ketika ia tampil dengan pakaian dan gaya busana dihadapan umum secara layak dan terhormat dengan memelihara kebersihan dalam penampilannya.⁷⁵
- b. Wabab Az-zuhaili, menyatakan bahwa akhlak berpakaian seorang muslim dan muslimah ialah ketika ia memakai pakaian sehari-hari yang wajar dan tidak menampakkan kesombongan, membanggakan diri, dan takabur. Apabila seorang memakai pakaian karena kesombongan maka akan merusak akhlak dan kebiasaannya. Sebaliknya, apabila seorang mencupkan diri dengan pakaian sederhana, niscaya Allah akan memberinya kewajiban. Yaitu seseorang mengawali memakai pakaian dengan menuangkan rasa syukurnya kepada Allah Swt dengan cara memujiNya atas rezeki dan pakaian yang telah diberikanNya.⁷⁶
- c. Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, menyatakan bahwa, akhlak berpakaian ialah ketika manusia meresapi nikmat pakaian yang telah diberikan Allah Swt kepadanya sehingga ia menutupi auratnya dan berpenampilan rapi dihadapan makhluk lain dengan melaksanakan tata

⁷⁵ Abdullah Nasih Ulwan, Ensiklopedia pendidikan akhlak mulia, (terj. Ahmad Maulana), Jil. 10, (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2012), h. 26

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Ensiklopedia akhlak muslim; Berakhlak Terhadap sesama & Alam Semesta, (terj. Akhmad Dzulfikar dan Muhammad Soleh Asri), (Jakarta; PT. Mizan Publika, 2014), h. 72

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷⁷

Dari pendapat para ulama terkait akhlak berpakaian, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akhlak berpakaian muslim dan muslimah yang menutup aurat dalam Islam adalah ketika seseorang mengenakan pakaian dengan rapi (menurut tuntunan Islam), menutup aurat dan tanpa berlebih-lebihan sesuai dengan apa yang telah digariskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detil model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan.

Berpakaian itu termasuk perintah Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-A'ra:31, Al-A'raf: 26 An-Nahl: 81 dan Al-Anbiya: 80. Rasulullah Saw. Juga menganjurkan, dengan bersabda:

.....كلنا وا شربا والبسا وتصدقنا في غير اسراف ولا مخيلت

Artinya:“(Makan) dan minumlah kalian, berpakaian dan bersedekahlah,tanpa berlebih-lebihan, tidak pula terlalu pelit”⁷⁸

⁷⁷ Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, ensiklopedia adab islam menurut al-quran dan as-sunnah, (terj. Abu ihsan al-atsari) jil. 2 (Jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007) h. 335

⁷⁸ Ahmad Hatta, Al-Qur'an Ar-Rahman, Tafsir Qur'an Perkata (Pt Maghfirah Pustaka, 2009). h. 62

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena Rasulullah Saw telah menerangkan apa yang di perbolehkan, apa yang di anjurkan dan apa yang di anjurkan.⁷⁹ Maka seorang muslim harus menjaga adab-adab berpakaian sebagaimana berikut ini:

- Laki-laki tidak di perbolehkan untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra.
- Tidak di perkenankan untuk memakai pakaian yang terlalu panjang.
- Hendaknya mengutamakan pakaian yang berwarna putih daripada warna lain.
Hendaknya seorang muslimah memanjangkan pakaiannya hingga menutupi kedua telapak kakinya.
- Hendaknya mengutamakan pakaian yang berwarna putih daripada warna lain.
- Tidak boleh berselimut dengan *carashamma*, yaitu membalut seujur tubuh dengan kain.
- Seorang muslim hendaknya tidak mengenakan pakaian seorang muslimah.
- Jika mengenakan sandal, di mulai dari yang kanan. Jika melepasnya di mulai dari yang kiri.
- Memakai pakaian dari anggota tubuh yang paling kanan.

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “(Hai) Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anakperempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya

⁷⁹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Panduan Hidup Setiap Muslim Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Pt. Ziyad Books 2017) h. 307

*mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸⁰

Dan batas aurat muslimah ada sesuai kondisi tubuh, Adam dan Hawa saat di turunkan dari syurga sebagaimana disebutkan dalam surah Thaha:121

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

Artinya: “(Maka) keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.”

Sedangkan pendapat ulama kontemporer, batas aurat perempuan adalah kondisional dan batasannya di tentukan dengan latar belakang budaya masyarakat setempat. Alasannya, latar belakang di turunkannya surah Al-Ahzab ayat 56 ketika ada seorang perempuan di ganggu karena memakai busana yang tidak menutup aurat, maka turunlah ayat itu agar mereka terhindar dari gangguan. Jadi, menurut ulama kontemporer, batas aurat di tentukan oleh budaya setempat selama perempuan tidak di ganggu karena pakaiannya. Sebagai perempuan yang sholehah,, sebaiknya memakai busana yang lebih panjang dan lebar, supaya terhindar dari binatang-binatang kecil pengganggu, seperti nyamuk dan lalat yang kadang membawa berbagai macam kuman penyakit. Selain itu dengan memakai busana panjang dan lebar, gerakan akan lebih bebas, hati menjadi tenang, tidak khawatir ada organ tubuh yang Nampak dari luar.⁸¹

⁸⁰ Ahmad Hatta, Al-Qur’an Ar-Rahman, Tafsir Qur’an Perkata (Pt Maghfirah Pustaka, 2009)

⁸¹ Ibid



Dalam Islam fungsi utama pakaian adalah menutup aurat sebagaimana tercantum dalam surah al-A'raf [7]: 26

يٰٓبَنِيٰٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَةِ
اَللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.

Dalam pandangan KH Ali Mustafa Yaqub, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tetapi Islam memiliki aturan umum berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan oleh almarhum dengan 4T, yaitu tidak terbuka (tutup aurat), tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis.

a. Tutup Aurat

Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah *mafhum* bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah.

Syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman nabi Adam dan Hawa ketika mereka berdua mendakati pohon yang dilarang oleh Allah swt untuk mendekatinya. Hal ini terdapat dalam surah al-A'raf [7], 22:

يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقٍ الْجَنَّةِ فَدَلَّهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَاَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"⁸²

b. Tidak Transparan

Pakaian yang tembus pandang, yang memperlihatkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang Islami. Sebab, secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik agar tidak transparan.

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitabnya Shohih Muslim/2128 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا»

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Dua (jenis manusia) dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang yaitu; kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga

⁸² *ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bahkan tidak akan mendapat wanginya, dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.*⁸³

c. Tidak Ketat

Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat.

Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif.

d. Tidak Menyerupai Lawan Jenis

Dalam sebuah Hadis yang terdapat dalam Shohih Bukhari/159, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: Diriwayatkan Ibn ‘Abbas Ra., berkata: “Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

Hadist di atas tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Secara umum hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi saw melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian.

Di samping itu etika berpakaian yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Dalam sebuah Hadis Rasulullah saw., sebagaimana terdapat dalam Sunan Ibn Majah/1379 sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَدَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

⁸³ *ibid*

Artinya: Rasulullah saw., bersabda kesederhanaan adalah bagian dari iman.

Keempat kriteria ini perlu diperhatikan ketika memilih, membeli, dan menggunakan pakaian. Perempuan yang menggunakan “hijab” tidak akan ada gunanya kalau pakaian yang mereka gunakan transparan dan ketat. Begitu pula laki-laki, tidak ada gunanya memakai jubah, kalau tembus pandang dan auratnya terlihat oleh orang lain.

B. Tata cara Berpakaian Muslim dan Muslimah menutup aurat

Busana muslim dan muslimah merupakan pakaian yang dikenakan laki-laki dan perempuan selama tidak keluar dari ajaran Islam. Setiap laki-laki dan perempuan muslim diharuskan untuk mengenakan busana muslim dan muslimah agar terhindar dari berbagai macam gangguan yang datang kepadanya.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ahzab [33] Ayat 59⁸⁴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيزٍ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Pokok pangkal dari berbusana menutup aurat seorang muslim, sebaliknya laki-laki atau perempuan memakai busana muslim dalam pergaulannya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan memandang wanita. Laki-laki hanya dibolehkan memandang wanita dalam batas-batas keluarga dan pernikahan saja. Hal ini dimaksudkan demi terciptanya

⁸⁴ Q.S Al Ahzab[33]:59, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka AlKautsar: 2009), h. 426



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarga yang sehat, harmonis dan saling mempercayai sebagai sendi terwujudnya masyarakat yang sehat, damai, berwibawa dan menjunjung tinggi harkat wanita.⁸⁵

Pakaian wanita muslimah menanamkan tradisi yang universal dan fundamental untuk mencegah kemerosotan moral dengan menutup pergaulan bebas. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Fuad M. Facruddin yang mengatakan bahwa busana yang dikenakan seorang muslimah bukan hanya menutup badan saja, melainkan harus menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat.⁸⁶

Standar berpakaian itu ialah pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai prespektif ajaran Islam:

1. Pakaian harus menutup aurat umat Islam dilarang keras bertelanjang dan membuka aurat,sebagaimana aurat laki-laki sebatas pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali yang dikecualikan dalil. Seperti muka dan telapak tangan walau masih ada perdebatan antara kalangan ulama.⁸⁷
2. longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada dibalikny.Maksudnya adalah tidak diperbolehkannya seseorang mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan kulit dan tubuhnya. Secara

⁸⁵ 27Husein Shabah, *Jilbab Menurut al-Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 2000), cet, ke-10, h. 18.

⁸⁶ Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), cet ke-2, h. 33.

⁸⁷ Syaikh Salim Bin Ied-Al-hilali, *Ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah; Bab Aqidah, fiqh dan Akhlak*, (terj. Abu Hasan al-Atsari), jil. 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), h. 217

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zahir mereka berpakaian namun pada hakikatnya mereka telanjang.⁸⁸

3. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya.
4. Pakaian tidak merupakan pakaian *syuhroh* (untuk ketenaran).

Islam sangat melarang seseorang mengenakan pakaian dengan kesombongan dan untuk ketenaran.

5. Tidak menyerupai pakaian khas orang-orang non-Muslim.

Pakaian itu tiada *bertashabbuh* dengan pakaian laki-laki atau perempuan-perempuan kafir dan musyrik. Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka.*”⁸⁹

C. Batasan-batasan aurat dan Fungsi Berpakaian menutup aurat

1. Batasan-batasan aurat

Agama Islam selaras dengan fitrah manusia. Selama fitrah itu tidak dinodai dan fitrah itu masih suci dari maksiat, maka menjaga aurat merupakan pembawaan manusia sejak lahir, sebagaimana nabi Adam dan istrinya ketika Nampak auratnya yang kemudian menutupinya dengan daun-daun surga. Namun, ketika fitrah ini mulai hilang dari bani Adam dan sifat malu mereka mulai terkikis maka harus ada yang mengontrol dan mengingatkan akan menjaga aurat. Begitu pentingngnya menjaga aurat dalam agama Islam sehingga seseorang di perbolehkan melempar dengan kerikil orang yang berusaha melihat atau mengintip aurat keluarganya di rumahnya, sebagaimana sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

⁸⁸ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih sunnah wanita*, (terj. Firdaus), (Jakarta Press, 2013), h. 417.

⁸⁹ 30 HR. bu Daud no. 4031, uhammad asir d-Din Al-Abani, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh:Maktabah Al-Ma'arif Li An- asir A t-Tauzi,1428H),h. 721

.....لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذِنْ لَهُ حَدَفْتُهُ بِحِصَاةٍ فَقَطَّاتٍ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

Artinya: “Jika ada orang yang berusaha melihat (aurat keluargamu) di rumahmu dan kamu tidak mengizinkannya lantas kamu melemparnya dengan kerikil sehingga membutakan matanya maka tidak ada dosa bagimu.” [HR. Al-Bukhâri, no. 688, dan Muslim, no. 2158].

Jumhur Ulama sepakat berpendapat ada 5 batasan-batasan aurat :

a. Aurat sesama Lelaki

Terjadi perdebatan mengenai perbedaan batasan aurat Antara sesama lelaki, baik dengan kerabat atau orang lain. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa aurat sesama lelaki adalah antar pusar sampai lutut, artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat sedangkan paha dan lainnya adalah aurat, dalil dan hadis mengenai ini semuanya memiliki kelemahan pada sisi sanadnya, namun dengan berkumpulnya semua jalur sanad tersebut menjadikan hadist tersebut bisa menjadi hujjah.⁹⁰

b. Aurat Laki-laki dengan Wanita

Jumhur Ulama sepakat bahwasanya batasan aurat laki-laki dan wanita mahramnya ataupun yang bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sesama laki-laki. Tetapi berselisih pendapat tentang masalah hukum wanita yang memandang laki-laki.

⁹⁰ Majalah As-Sunnah edisi 09/tahun XVII/1435H/2014. Yayasan Lajnah Istiqomah, Surakarta 2014 <http://almanhaj.info/main/themes/images/pdf/kewajiban menutup aurat dan batasannya .pdf>, akses 2 Desember 2020 jam 17:00, h. 6

Pendapat pertama, Ulama Safiiyah berpendapat bahwasanya tidak boleh seorang wanita melihat aurat laki-laki dan bagian lainnya tanpa sebab. Dalil firman Allah SWT yang Artinya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Artinya: Dan katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan nya. [an-Nur/ 24;31]

Dan hadist Ummu Salamah radiyallahu anhuma berkata:

كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمِيَاوَانِ أَتُنْمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

Artinya: “ Aku berada disisi Rasulullah SAW ketika maimunah sedang bersamanya. Lalu masuk Ibnu Ummi Maktum Radiyallahu anhu yaitu ketika perintah hijab telah diturunkan, maka Rasulullah SAW pun bersabda, Berhijablah kalian berdua darinya. “Kami bertanya; Wahai Rasulullah, bukankah ia buta sehingga ia tidak bisa melihat dan mengetahui kami?” Rasulullah saw balik bertanya, “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihatnya? [HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I dalam Sunnah Al-Kubra, no.9197, 9198] namun dilemahkan oleh Syaikh al-Albani.⁹¹

Dan mereka menggunakan qiyas dalam berdalil: “ yaitu sebagaimana yang diharamkan bagi para laki-laki melihat wanita seperti itu pula diharamkan melihat laki-laki”

⁹¹ <https://almanhaj.or.id/4114-kewajiban-menutup-aurat-dan-batasannya.html> akses 2 Desember 2020 jam 17:00.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat kedua yaitu pendapat ulama dikalangan mazhab Hambali, boleh bagi wanita melihat pria lain selain auratnya. Mereka berdalil dengan hadist yang diriwayatkan oleh aisyah radiallahu anhuma, dia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ،
حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسَاءُ ، فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ

Artinya: “Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan pakaiannya, sementara aku melihat ke orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam Masjid sampai aku sendiri yang merasa puas. Karenanya, sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka bercanda. [HR.Al-Bukhari, no,5236; Muslim, no.892]⁹²

c. Aurat laki-laki dengan Istri

Suami adalah mahram wanita yang telah terjadi akibat pernikahan, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini, bahwasanya seorang suami atau istri boleh melihat seluruh anggota tubuh pasangannya. Hadist Aisyah radiyallahu anhuma berkata:

قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ

Artinya: “Aku mandi bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu bejana dalam keadaan junub” [HR. Al-Bukhari no 263 dan Muslim no. 43]

d. Aurat wanita didepan Laki-laki yang bukan mahramnya.

Diantara sebab mulia nya seorang wanita adalah dengan menjaga auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, oleh karena itu Islam memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang harus ditutupi dan tidak

⁹² *ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh ditampilkan. Ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutup, kecuali telapak tangan dan wajah.

e. Aurat wanita di depan mahramnya

Mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab, kekerabatan dan persusuan. Pendapat yang paling kuat tentang aurat wanita di depan mahramnya yaitu seorang mahram diperbolehkan melihat aurat wanita ketika dirumahnya seperti kepala, muka, leher, lengan, kaki, betis atau dengan kata lain melihat anggota tubuh yang terkena air wudu' (sumber hukum surah An-Nur ayat 31). Dan hadist Ibnu Umar Radiyallahu anhu, beliau berkata:

كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا

Artinya: "Dahulu kaum laki-laki dan perempuan pada zaman Nabi SAW melakukan wudu' secara bersamaan [HR. Al-Bukhari, no.193]"⁹³

2. Fungsi berpakaian menutup aurat

Fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali yang dihalalkan dalam agama. Dan dianjurkan berpakaian dengan tidak berlebihan.

Semakin dinamisnya budaya dan peradaban manusia, maka terciptalah busana yang beraneka ragam motif dan mode. Busana dikenakan manusia tidak begitu saja tercipta dan terpakai tanpa adanya pemikiran tentang fungsi dan tujuan dari berbusana menutup aurat tersebut. Secara umum fungsi mengapa manusia menggunakan busana adalah:⁹⁴

⁹³ Majalah As-Sunnah edisi 09/tahun XVII/1435H/2014. Yayasan Lajnah Istiqomah, Surakarta 2014 <http://almanhaj.info/main/themes/images/pdf/kewajiban menutup aurat dan batasannya.pdf>, akses 2 Desember 2020 jam 17:00, h. 6

⁹⁴ Labib Mz, *Wanita dan Jilbab* (Gresik: CV.Bulan Bintang, 1999), cet. Ke 1, h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Memenuhi syarat peradaban sehingga tidak menyinggung rasa kesusilaan.
- b. Memenuhi syarat kesehatan, yaitu melindungi badan dari gangguan luar. Seperti panas, hujan, angin dan lain-lain.
- c. Memenuhi syarat keindahan.
- d. Menutupi segala kekurangan yang ada pada tubuh kita.

Dari sudut sosiologis, terkhusus untuk muslimah busana menutup aurat berfungsi sebagai:⁹⁵

- a. Menjauhkan wanita dari pergaulan laki-laki yang buruk.
- b. Mencegah timbulnya fitnah dari laki-laki.
- c. Memelihara kesucian agama wanita yang bersangkutan.

Menurut Istadiyanto, fungsi busana muslimah menutup aurat pertama membentuk pola sikap atau akhlak yang lihur dalam diri remaja sebagai pencegah terhadap dorongan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Kedua mencegah orang lain untuk berbuat sewenang-wenang terhadap sipemakai.⁹⁶

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebut beberapa fungsi busana yaitu :⁹⁷

- a. Sebagai pelindung dari kejahatan yang memancing hawa nafsu (bagi perempuan), dan menunjukkan etika (bagi laki-laki).
- b. Sebagai perhiasan, yaitu penambah rasa estetika berbusana
- c. Sebagai pelindung diri dari gangguan luar, seperti panas terik matahari, udara dingin dan sebagainya.

⁹⁵ M. Thalik, *Analisa dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: al-ikhlas, 1987) h. 23

⁹⁶ Istadiyanto, *Hikmah Jilbab dan Pembinaan Akhlak*, (Solo: Ramadhani, 1998), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut M. Quraish Shihab, selain tiga hal diatas busana juga mempunyai fungsi sebagai petunjuk identitas dan pembela Antara seseorang dengan orang lain.⁹⁸ Sebagaian ulama bahkan menyatakan fungsi busana yang lainnya adalah fungsi takwa dalam arti busana dapat menghindarkan seseorang terjerumus dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhwawi.⁹⁹ Dari beberapa fungsi busana yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi busana untuk melindungi diri dari prasangka buruk orang lain, menutup aurat, menunjukkan identitas, pelindung diri dan sebagai pakaian takwa.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan 1998), cet. Ke-13, h. 279

⁹⁹ Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, h. 161

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan “ *PENERAPAN PERATURAN ADAT NAGARI SITUJUH BATUA TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI NAGARI ADAT SITUJUH BATUR (PERNAG NO1 TAHUN 2009) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*” yang mana pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Munculnya Peraturan Nagari Situjuh Batur tentang kewajiban berpakaian menutup aurat dipicu dari makin maraknya pemahaman masyarakat di Minangkabau terkhusus Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak mengerti pentingnya berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Islam, yang menjadikan acuan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah nagari untuk mengatur undang-undang yang mengatur berbusana atau berpakaian yang sesuai tuntunan ajaran Islam, agar kembalinya mengamalkan filosofi adat di Minangkabau “adat basandi syara’- syara’ basandi kitabullah” di bumi Minang terkhusus untuk nagari Situjuh Batur yang dituangkan dalam Pernag No.1 tahun 2009 “kewajiban setiap elemen masyarakat Situjuh Batur keluar menggunakan pakaian menutup aurat”.
2. Penerapan Pernag No. 1 Tahun 2009 tentang pemerintahan Desa terhadap menganjurkan berpakaian menutup aurat di Nagari adat Situjuh batur pada hal-hal tertentu seperti berdasarkan wawancara yang didapati, yaitu melihat masih banyaknya tata cara berpakaian masyarakat Situjuh Batur baik dikalangan muda-mudi dan dewasa masih kurangnya pemahaman tentang adat-adat berpakaian dalam islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dan masih kurangnya pemahaman elemen masyarakat mengenai konsep pakaian menutup aurat yang belum diterapkan menurut PERNAG no 1 tahun 2009, dan juga masih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya himbauan atau ketegasan pemerintahan Situjuh batur mengenai penerapan peraturan tersebut.

3. Tinjauan Fiqh Syasah tentang pentingnya peraturan berpakaian ini, dilihat dari sisi kemashlahan dan kemudharatannya. Penerapan peraturan berpakaian menutup aurat ini masih kurang berjalan nya diatas prinsip-prinsip kemashlahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Selain itu tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya bukan sekedar memajukan pembangunan ,ekonomi dan lain-lain namun juga harus melihat lebih sisi social masyarakat , karena ini merupakan factor penting demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang analisis pelaksanaan PERNAG No. 1 Tahun 2009 tentang Penerapan pakaian menutup aurat di Nagari Adat Situjuh batur maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan desa hendaknya harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan banyaknya rusak moral dan juga cara bergaul bebas yang mana pakaian merupakan salah satu factor mendasar dari terjadinya hal tersebut.
2. Pemerintahan desa hendaknya berupaya untuk lebih tegas dalam menerapkan peraturan mengenai berpakaian menutup aurat tersebut dan melampirkan gambaran-gambaran jelas tentang pakaian menutup aurat demi kemashlahatan rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

- A Diazulli, *Kaidah Kaidah Fikiah*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- Ahmad Hatta, *Al-Qur'an Ar-Rahman, Tafsir Qur'an Perkata* (Pt Maghfirah Pustaka, 2009)
- Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih sunnah wanita, terj. Firdaus*, (Jakarta Press 2013)
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)
- A Diazulli, *Kaidah Kaidah Fikiah Ibnu Qayyim, at-Thuruq al-Hukmiah*, (Jakarta Putra Grafika, 2006)
- Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia adab islam menurut al-quran dan as-sunnah, terj. Abu ihsan al-atsari*, (Jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009) jil. 2,
- Abdullah Nasih Ulwan, *Ensiklopedia pendidikan akhlak mulia, terj. Ahmad Maulana*, (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2012) Jil. 10,
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum U11*, (Yogyakarta. 2001)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1997)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, QS.An-nisa ayat 59* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1971)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Tan Marajo, Wali Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh limo nagari, wawancara, (*Kantor Desa Nagari Situjuh* tanggal 27 Juli 2019)

Firdaus, Sekdes di Nagari Situjuh Batur Kecamatan Situjuh limo nagari, wawancara, (*Kantor Desa Nagari Situjuh* tanggal 27 Juli 2019)

Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991)

Hamka, *Membahas Tentang Soal-Soal Islam*, (Jakarta: Dhama Caraka, 1985)

Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2003)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1146021a8b0/peran-masyarakat-dalam-pembentukan-perda> akses 5 Desember 2020 16:15

http://www.javanologi.info/main/themes/images/pdf/Demokrasi_Lokal-sarjana.pdf, akses 2 Desember 2020 jam 12.05,

H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014,

Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2003)

Istadiyanto, *Hikmah Jilbab dan Pembinaan Akhlak*, (Solo: Ramadhani, 1998)

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Perpustakaan Nasional, (Yogyakarta, 2016)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993)

Lewis Vaughn, *Doing ethics Moral reasoning and Contemporary issues*, (United states of Amerika: matrix Publishing Services, 2008)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: UPFE UMY, , 2003)

Muhammad Alim, *Perda-Perda Bernuansa Islam Dan Hubungannya Dengan Kostitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jurnal Hukum, 2010)

Makinuddin Syahril, *Buku Sejarah Peristiwa Situjuh ditengah perjuangan bangsa, Situjuh Batua*, (2019)

Miriam Budiardjo, Sebagaimana yang dikutip dari H.D. Stoutdalam Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006)

M. Thalik, *Analisa dalam Bimbingan Islam*,(Surabaya: al-ikhlas, 1987)

M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1998)

Munir Sirojul, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia, Konsep Azas dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013)

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Nur Hidayat, *Akhlak Tasawuf*, (Yogyakarta: Ombak, 2013)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nonomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Q.S Al Ahzab[33]:59, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka AlKautsar, 2000)

Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*,(Jakarta: INIS, 1996)

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan, Makalah*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998)

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)

Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004)

Syamsul Bachrie, *Keberadaan Peraturan Daerah dan Permasalahannya*”, (Jurnal Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar, 2004)

Syarif Hidayat, *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah*, (Jentera: Peraturan Daerah , 2006) edisi 14 Tahun IV

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim Panduan Hidup Setiap Muslim Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Pt. Ziyad Books 2017 Ahmad Hatta, *Al-Qur’an Ar-Rahman, Tafsir Qur’an Perkata*, (Pt Maghfirah Pustaka, 2009)

Syahrul Amin, *Menuju Persaingan Pokok Islam*. (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1983)

Syaikh Salim Bin Ied-Al-hilali, *Ensiklopedia larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah; Bab Aqidah, fiqh dan Akhlak*, terj. Abu Hasan al-Atsari, jil. 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 32 tahun 2004, Pasal 140 ayat (1) menyebutkan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, gubernur, atau Bupati/Walikota.

UU No. 10 tahun 2004, Pasal 10 ayat 11-14

UU No. 5 tahun 1974, Pasal 44 ayat 22

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

W.Riawan Tjandra dan Kresna Budi Darsono, *Legislative Drafting; Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta, penerbit UAJY 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia akhlak muslim, , Berakhlak Terhadap sesama & Alam Semesta*, terj. Akhmad Dzulfikar dan Muhammad Soleh Asri, (Jakarta; PT. Mizan Publika, 2014)

Yosrizal, Ketua Karang Taruna Nagari Situjuh Batur Kecamatan Sitjua Limonagari, *wawancara*, tanggal 1 agustus 2019





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul: *Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Menutup Aurat Di Nagari Adat Situjuh Batur Dalam Prespektif Fiqh Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad ihsan
NIM : 11424103863
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

.....

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag

.....

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

.....

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3105/2021

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD IHSAN
NIM : 11424103863
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : XIV (Empat Belas)
Lokasi : SITUJUH BATUR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : PENERAPAN PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUR NO 1 TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI NAGARI ADAT SITUJUH BATUR
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/40324
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3105/2021 Tanggal 24 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

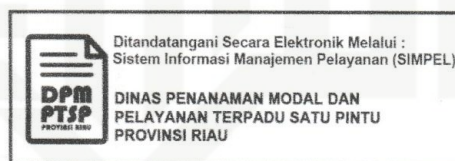
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD IHSAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11424103863 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENERAPAN PERATURAN NAGARI SITUJUJH BATUR NO 1 TAHUN 2009
TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI NEGARI ADAT SITUJUJH BATUR
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | SITUJUJH BATUR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 637 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2021

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang :**
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :**
- Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/3105/2021 Tanggal 24 Maret 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Muhammad Ihsan
Tempat/Tanggal Lahir : Situjuh Batur
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tengah
Nomor Kartu Identitas : 1307101306960002
Judul Penelitian : Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Menutup Aurat Di Nagari Adat Situjuh Batur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Lokasi Penelitian : Situjuh Batur
Jadwal Penelitian : Maret 2021 s.d Agustus 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 April 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dilandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, A.P.M.Si
NIP. 197406181993111001



Tembusan:

- Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
NAGARI SITUJUH BATUA**

Jalan Khatib Sulaiman No.1
Telp. (0752) 774010

Kode POS 26263
Faks.(0752)774010

SURAT KETERANGAN

. Nomor: 142/210/SKET-NSB/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DV. DT. TAN MARAJO**

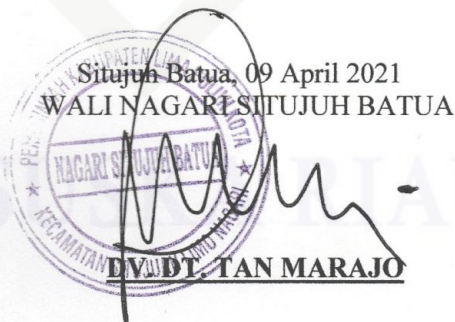
Jabatan : Wali Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari
Kabupaten Lima puluh Kota.

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama/gelar	: MUHAMMAD IHSAN
NIK/ NIM	: 1307101306960002/ 11424103863
Tempat/Tgl.Lahir	: Situjuh Batur/ 13 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
A l a m a t	: Jorong Tengah Situjuh Batua

1. Bahwa nama yang tersebut diatas adalah benar Penduduk Jorong Tengah Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
2. Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah selesai melakukan Penelitian yang berjudul "Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 tentang Pakaian Menutup Aurat di Nagari Adat Situjuh Batur Dalam Perspektif Fiqh Siyash", yang dilakukan di Nagari Situjuh Batua.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sabagaimana mestinya.

Situjuh Batua, 09 April 2021
WALI NAGARI SITUJUH BATUA

DV. DT. TAN MARAJO

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

1. Nama	: MUHAMMAD IHSAN
2. Alamat Sesuai KTP	: TENGAH
3. Pekerjaan	: MAHASISWA
4. Nomor Telepon/HP	: 08 22 17 84 3337
5. Nomor KTP	: 1307101306960002
6. Judul Penelitian	: PENERAPAN PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUR NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI NAGARI ADAT SITUJUH BATUR DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

Dengan ini menyatakan bahwa melaksanakan kegiatan penelitian/survey akan mentaati dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

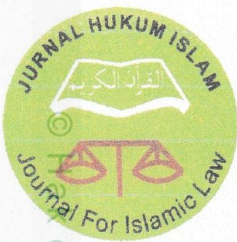
Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Padang, 31 April 2021
Peneliti/Penanggung Jawab/Koordinator



(Handwritten signature of Muhammad Ihsan)

(.....MUHAMMAD IHSAN.....)



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD IHSAN
NIM : 11424103863
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PENERAPAN PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUR NO 1
TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN MENUTUP AURAT DI
NAGARI ADAT SITUJUH BATUR DALAMPERSPEKTIF FIQH
SIYASAH

Pembimbing: H. Rahman Alwi, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MUHAMMAD IHSAN, lahir di Situjuh Batur, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 13 Juni 1996, merupakan anak keempat dari 6 (enam) bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Drs. Syaiful M (alm) dan Ibu Elizar Spd.i. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SD 01 Situjuh Batur pada tahun 2003-2008, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsumatera Thawalib Parabek Bukittinggi selama empat tahun dari tahun 2008-2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri 3 Payakumbuh pada tahun 2012-2014. Setelah tamat dari tingkat aliah, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru.

Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur SBMPTN. Penulis telah melakukan magang di Pengadilan Agama pada februari-maret 2017 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli-Agustus 2018. Penulis melakukan penelitian dengan judul Penerapan Peraturan Nagari Situjuh Batur No 1 Tahun 2009 Tentang Pakaian Menutup Aurat Di Nagari Adat Situjuh Batur dalam Perspektif Fiqh Siyasah , di bawah bimbingan Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 27 April 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,27 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukumi (SH) dengan predikat .